



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan Pahlawan No. 02 Purworejo, Jawa Tengah 54171

Telepon: (0275) 322247, Faximile: (0275) 3128726

Laman: dinperkimitan.purworejokab.go.id; Pos-el: dinperkimitan.purworejokab@gmail.com

**PEDOMAN PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PERUBAHAN/
REVISI SITEPLAN PERUMAHAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

I. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PERMOHONAN PENGESAHAN SITEPLAN BARU

A. Syarat Administrasi Permohonan Pengesahan Siteplan Baru

1. Asli Surat Permohonan Pengesahan Siteplan.
Diajukan oleh pemohon (pengembang) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (format terlampir).
2. Pas foto berwarna pemohon.
3. Fotokopi KTP pemohon (pengembang).
4. Dokumen perizinan berusaha yang diperoleh melalui sistem OSS (yang memuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau sertifikat standar).
5. Surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) lokasi lahan perumahan yang diajukan.
KKPR atau KRK yang menyatakan bahwa lokasi dimohon merupakan zona peruntukan yang dapat dibangun perumahan (tidak masuk dalam lahan pertanian basah/ tanaman pangan yang termasuk dalam KP2B/LSD).
6. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non-Berusaha lahan pemakaman apabila disediakan di luar lahan perumahan yang dimohonkan.
7. Asli Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menangani kebencanaan apabila lokasi perumahan masuk dalam daerah rawan bencana.
8. Fotokopi bukti sertifikat kepemilikan tanah perumahan dengan ketentuan :
 - a) SHM untuk pengembang perorangan dan SHGB untuk pengembang berbadan hukum,
 - b) sertifikat atas nama pemohon/pengembang, dan
 - c) merupakan sertifikat gabungan (induk) jika lokasi yang dimohon meliputi 2 (dua) atau lebih sertifikat tanah.
9. Dokumen penyediaan lahan pemakaman (pilih salah satu) :
 - a) Jika lahan makam disediakan di dalam lokasi perumahan, maka tidak memerlukan dokumen penyediaan lahan makam. Gambar siteplan yang tertera penyediaan lahan pemakaman sebagai bukti

dokumen penyediaan lahan pemakaman dalam permohonan online.

- b) Asli sertipikat tanah makam atas nama pengembang **disertai** Asli akta notaris pelepasan tanah makam ke Pemerintah Kabupaten Purworejo jika lahan makam disediakan di luar lokasi tanah perumahan yang diajukan, atau
 - c) Asli bukti setor uang pengganti lahan pemakaman ke rekening kas umum daerah **disertai** Asli surat keterangan NJOP tertinggi dan besaran uang pengganti lahan pemakaman dari perangkat daerah yang berwenang (format PDF).
10. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang masih berlaku (apabila rencana jumlah kaveling 21 unit atau lebih).
 11. Bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan berupa :
 - a) Persetujuan teknis pengelolaan air limbah jika membangun perumahan non-subsidi
 - b) SPPL Rinci yang diperoleh melalui simple.purworejokab.go.id jika membangun perumahan subsidi
 12. Asli surat pernyataan bermaterai Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan (format terlampir).
 13. Asli surat pernyataan bermaterai Pembangunan Rumah dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan (format terlampir).
 14. Asli surat pernyataan bermaterai Nilai Perolehan Tanah Perumahan (format terlampir).
 15. Asli surat pernyataan bermaterai Pelepasan Tanah PSU Saat Melakukan Pecah Sertipikat (format terlampir).
 16. Asli surat pernyataan bermaterai Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi jika pembangunan diperuntukan untuk rumah umum/ subsidi (format terlampir).
 17. Gambar Rencana Siteplan dalam format A4 atau A3 yang sudah ditandatangani pemohon (format terlampir). Pemilihan ukuran kertas memperhatikan luas lahan perumahan dan kejelasan tulisan hasil cetak untuk dibaca.

B. Syarat Teknis Permohonan Pengesahan Siteplan Baru

Gambar rencana tapak (siteplan) perumahan terdiri dari komponen berikut:

1. Lembar pengesahan.
2. Nomor Register Siteplan.
3. Gambar denah lokasi siteplan.
4. Gambar siteplan dengan ukuran :
 - nomor kaveling,
 - ukuran dalam meter,
 - luas kaveling (sesuai ketentuan tata ruang, khusus rumah umum sesuai perundangan yang berlaku),
 - tipe bangunan (minimal 36 m², khusus rumah umum sesuai perundangan yang berlaku), dan
 - titik koordinat tiap sudut lahan.
5. Tabel rencana intensitas bangunan (KDB, KDH, KLB, dan Jumlah Lantai) dengan ketentuan :

- a. mengacu rencana tata ruang dan tata bangunan yang berlaku
- b. Koefisien Dasar Bangunan Kolektif (KDB Kolektif) tidak melebihi ketentuan

$$KDB \text{ Kolektif} = \frac{Luas \text{ Lantai} \text{ Dasar}}{Luas \text{ Total} \text{ Bangunan Seluruh Kaveling}} \times 100\%$$

$$= \frac{Luas \text{ Lantai} \text{ Dasar}}{Luas \text{ Total} \text{ Lahan Perum}} \times 100\%$$

- c. Koefisien Dasar Bangunan Kaveling (KDB Kaveling) tidak melebihi ketentuan

$$KDB \text{ Kaveling} = \frac{Luas \text{ Lantai} \text{ Dasar}}{Luas \text{ Kaveling} \text{ Bangunan Kaveling}} \times 100\%$$

- d. Koefisien Dasar Hijau Kolektif (KDH Kolektif) minimal sama dengan ketentuan

$$KDH \text{ Kolektif} = \frac{Luas \text{ Total} \text{ RTH} \text{ Publik} \text{ dan RTH} \text{ Privat}}{Luas \text{ Total} \text{ Lahan Perum}} \times 100\%$$

- e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) tidak melebihi ketentuan

Rumus KLB =

$$= \frac{Luas \text{ Keseluruhan} \text{ Lantai} \text{ (Lt 1 + Lt 2 + dst)}}{Luas \text{ Kaveling} \text{ Suatu Bangunan}} \times 100\%$$

- f. jumlah Lantai tidak melebihi ketentuan

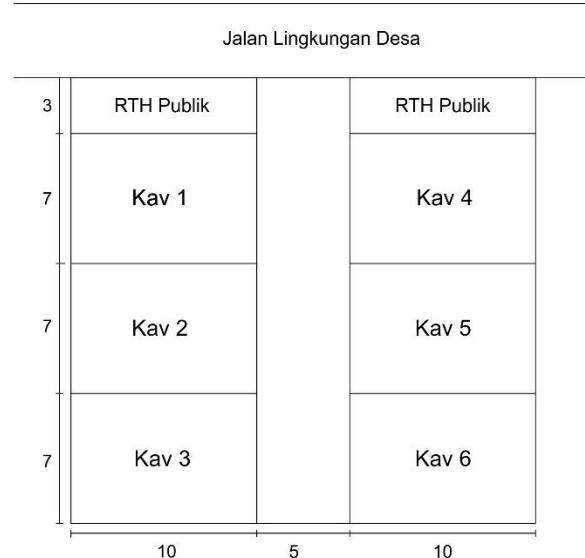
- g. luas kaveling minimum sesuai ketentuan

Contoh Penerapan :

Seorang pengembang berencana membangun perumahan yang terdiri dari 6 unit rumah pada lahan seluas 600 m². Masing-masing kaveling memiliki luas 70 m². Perumahan terdiri dari 3 rumah berlantai 2 dengan Tipe 75 (lantai 1 luas bangunan 45 m² dan lantai 2 luas bangunan 30 m²) dan 3 unit rumah dengan tipe 36 (luas bangunan 36 m²). Luas jalan dan saluran 120 m² dan luas RTH Publik 60 m².

Dalam KRK / KKPR tertulis rencana KDB 70%, KDH 30%, KLB 1,4, Jumlah Lantai 2 dan luas kaveling minimum 70 m². Maka perhitungan rencana siteplan perumahan pengembang terhadap ketentuan dalam KRK / KKPR adalah sebagai berikut.

Gambar Rencana Siteplan



➤ KDB Kolektif

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Type Lantai 1	Type Lantai 2
(a)	(b)	(c)	(d)	(c-d)
1	70	75	45	30
2	70	75	45	30
3	70	75	45	30
4	70	36	36	-
5	70	36	36	-
6	70	36	36	-
Total	420		243	
Luas lahan : 600 m ²				
KDB Kolektif : 243 : 600 x 100% = 40,5%				

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa KDB kolektif rencana pembangunan perumahan adalah 40,5%. Nilai tersebut **lebih kecil** dari ketentuan KDB maksimal dalam KRK/KKPR sebesar 70%. Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan KDB kolektif sehingga dapat diterapkan.

➤ KDB Kaveling

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Type Lantai 1	Type Lantai 2
(a)	(b)	(c)	(d)	(c-d)
1	70	75	45	30
2	70	75	45	30
3	70	75	45	30
4	70	36	36	-
5	70	36	36	-
6	70	36	36	-
Total	420		243	

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Type Lantai 1	Type Lantai 2
	Luas lahan : 600 m ²			
	KDB Kaveling 1 adalah $45 : 70 \times 100\% = 64,3\%$			
	KDB Kaveling 2 adalah $45 : 70 \times 100\% = 64,3\%$			
	KDB Kaveling 3 adalah $45 : 70 \times 100\% = 64,3\%$			
	KDB Kaveling 4 adalah $36 : 70 \times 100\% = 51,4\%$			
	KDB Kaveling 5 adalah $36 : 70 \times 100\% = 51,4\%$			
	KDB Kaveling 6 adalah $36 : 70 \times 100\% = 51,4\%$			

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa KDB pada setiap kaveling rencana pembangunan perumahan adalah 51,4% dan 64,3%. Nilai tersebut **lebih kecil** dari ketentuan KDB maksimal dalam KRK/KKPR sebesar 70%. Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan KDBkaveling sehingga dapat diterapkan.

➤ KDH Kolektif

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Type Lantai 1	Type Lantai 2	RTH Kaveling (M ²)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c-d)	(b-d)
1	70	75	45	30	25
2	70	75	45	30	25
3	70	75	45	30	25
4	70	36	36	-	34
5	70	36	36	-	34
6	70	36	36	-	34
Total	420				177
Ruang Terbuka : $60 + 177 = 237$					
Luas lahan : 600 m ²					
KDH Kolektif : $237 : 600 \times 100\% = 39,5\%$					

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa KDH kolektif rencana pembangunan perumahan adalah 39,5%. Nilai tersebut **lebih besar** dari ketentuan KDH minimal dalam KRK/KKPR sebesar 30%. Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan KDH sehingga dapat diterapkan.

➤ KLB

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	KLB
(a)	(b)	(c)	(c : b)
1	70	75	1,07
2	70	75	1,07
3	70	75	1,07
4	70	36	0,51

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	KLB
5	70	36	0,51
6	70	36	0,51

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa KLB rencana pembangunan perumahan pada tiap kaveling antara 0,51 dan 1,07. Nilai tersebut **lebih kecil** dari ketentuan KLB dalam KRK/KKPR sebesar 1,4. Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan KLB sehingga dapat diterapkan.

➤ Jumlah Lantai

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Jumlah Lantai
(a)	(b)	(c)	(d)
1	70	75	2
2	70	75	2
3	70	75	2
4	70	36	1
5	70	36	1
6	70	36	1

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah lantai rencana pembangunan perumahan pada tiap kaveling antara 1 dan 2. Nilai tersebut **tidak melebihi** dari ketentuan jumlah lantai dalam KRK/KKPR sebesar 2. Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan Jumlah Lantai sehingga dapat diterapkan.

➤ Luas Kaveling Minimum

Kaveling	Luas Kaveling (M ²)	Type	Jumlah Lantai
(a)	(b)	(c)	(d)
1	70	75	2
2	70	75	2
3	70	75	2
4	70	36	1
5	70	36	1
6	70	36	1

Hasil :

Dari tabel diatas diketahui bahwa tiap kaveling memiliki luas 70 m². Luas tersebut **sesuai** ketentuan dalam KRK/KKPR yaitu paling kecil/minimum adalah 70 m². Dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan perumahan **SESUAI** dengan ketentuan Luas Kaveling Minimum sehingga dapat diterapkan.

6. Gambar siteplan dilengkapi garis sempadan. Ketentuan garis sempadan mengacu pada Perda No. 22 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan.

7. Lokasi perumahan berada pada kemiringan lahan 0-15% dimana pada kemiringan lebih dari 8% dibutuhkan rekayasa teknis.
8. Persentase prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dengan ketentuan :
 - luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 25 hektar maka luas PSU minimal 30% dari luas lahan perumahan
 - luas lahan perumahan lebih dari 25 hektar sampai dengan 100 hektar maka luas PSU minimal 40% dari luas lahan perumahan
 - luas lahan perumahan lebih dari 100 hektar maka luas PSU minimal 45% dari luas lahan perumahan
9. Gambar letak prasarana jalan dan drainase perumahan serta sumur resapan air hujan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jalan perumahan dengan lebar RUMIJA minimal 5 m (perkerasan badan jalan minimal 4 m dan sisanya diperuntukkan saluran drainase),
 - b. pada perumahan yang tidak dapat membentuk jalan memutar maka harus menyediakan ruang manuver kendaraan roda empat (culdesac) dengan ukuran minimal 5 (lima) meter dikali 5 (lima) meter,
 - c. jalan eksisting yang berada di sepanjang bidang tanah perumahan yang direncanakan dan/atau dimanfaatkan untuk akses kendaraan roda empat atau lebih bagi penghuni Perumahan, apabila memiliki Ruang Milik Jalan (Rumija) kurang dari 5 (lima) meter maka pengembang harus melakukan pelebaran menjadi minimal 5 (lima) meter dan hasil pelebaran dihitung sebagai pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - d. setiap depan kaveling bangunan harus terlayani oleh saluran drainase,
 - e. drainase perumahan harus terintegrasi dengan sistem jaringan makro wilayah regional yang lebih luas dan apabila tidak memungkinkan harus dilengkapi sumur resapan air hujan atau kolam penampungan yang berkapasitas cukup,
 - f. pada lokasi perumahan yang tidak dilalui jaringan drainase eksisting, maka pematusan air hujan dengan menyediakan sumur resapan yang memadai,
 - g. kapasitas drainase mampu menghindarkan kawasan perumahan dari banjir.
10. Gambar detail potongan jalan, drainase, dan sumur resapan air hujan.
11. Gambar letak jaringan air bersih (PDAM atau sumur bor komunal).
12. Gambar letak prasarana pengolah air limbah berupa IPAL Komunal.
13. Gambar letak prasarana pengelolaan sampah.

Tiap rumah harus menyediakan 2 tempat sampah (organik dan non organik) terbuat dari plastik yang mudah dibersihkan, diangkat, diputar dan ditumpahkan.
14. Gambar letak dan luasan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan ketentuan :
 - a. jumlah sampai dengan 100 unit = minimal 1 m² per penduduk (minimal 4 m² per kaveling efektif).

- b. jumlah lebih dari 100 unit = minimal 20% dari luas lahan keseluruhan perumahan.
15. Gambar letak dan luasan sarana pemakaman dengan ketentuan :
- Menyediakan lahan pemakaman di dalam atau di luar lokasi perumahan dengan luas minimal 2% dari total luas lahan perumahan.
 - Bidang lahan pemakaman digambarkan dalam siteplan jika disediakan di dalam lokasi perumahan.
 - Bidang lahan pemakaman digambarkan pada lembar tersendiri dan dilengkapi titik koordinat tiap sudut jika lahan pemakaman disediakan di luar lokasi perumahan. Penyediaan lahan pemakaman dapat dihitung sebagai bagian dari penyediaan RTH publik
 - Pengembang dapat mengganti penyediaan lahan pemakaman dengan uang senilai 2% (dua persen) dari total luas lahan perumahan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tertinggi pada lokasi perumahan kepada rekening kas umum daerah Kabupaten Purworejo. Penyediaan sarana lahan pemakaman dengan uang pengganti tidak dihitung sebagai pemenuhan proporsi lahan PSU perumahan.
16. Gambar letak dan luasan sarana parkir. Penyediaan sarana perniagaan wajib menyediakan sarana lahan parkir sesuai standar ruang parkir yang berlaku dan mampu mengakomodir kendaraan roda empat.
17. Gambar letak sarana lain jika telah memenuhi jumlah kaveling hunian minimum yaitu :
- Sarana Balai Pertemuan Warga. Apabila memenuhi penduduk pendukung 2.500 jiwa atau memenuhi kriteria pembentukan unit Rukun Warga (RW).
 - Sarana Peribadatan berupa mushola. Apabila memenuhi penduduk pendukung 250 jiwa atau 63 unit kaveling hunian dalam satu kawasan perumahan dengan luas lahan minimal 100 m².
 - Sarana Rekreasi dan Olah Raga berupa taman bermain anak dan lapangan olahraga. Apabila memenuhi penduduk pendukung 2.500 jiwa atau memenuhi kriteria pembentukan unit Rukun Warga (RW).
18. Gambar letak titik penerangan jalan umum (PJU).
19. Panjang deret maksimal rumah adalah 60 m.
20. Luas kaveling minimum rumah sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Lebar muka depan kaveling rumah minimal 5 m.
22. Lebar muka depan kaveling ruko minimal 4 m.
23. Lebar muka depan kaveling kios minimal 3 m.
24. Luas minimal lantai bangunan satu rumah sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Gambar dibuat skalatis dan contoh format terlampir (dapat menyesuaikan).

C. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengesahan Siteplan Baru

- Scan seluruh dokumen wajib menggunakan mesin scanner untuk menjamin hasil pindai datar, tegak lurus, detail, jelas, dan mudah terbaca.

2. Pemohon mengajukan permohonan online melalui izin.purworejokab.go.id. dengan memilih menu **Permohonan Izin** → **Permohonan Pengesahan Siteplan Baru** → **Daftar**.
3. Isi informasi data-data yang diperlukan. Simpan nomor pendaftaran dan password untuk *tracking* progres permohonan *online*.
4. Upload scan surat Permohonan dari pemohon (format PDF).
5. Upload pas foto 4x6 (format JPG).
6. Upload scan KTP pemohon (format JPG).
7. Upload dokumen perizinan berusaha yang diperoleh melalui sistem OSS (format PDF).
8. Upload scan KRK atau KKPR lahan perumahan (format PDF).
9. Upload scan KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman apabila disediakan di luar tanah perumahan yang dimohonkan (format PDF).
10. Upload scan Gambar Rencana/ Site Plan ukuran A4 atau A3 yang telah dibubuhi tanda tangan (format PDF).
11. Upload scan sertifikat kepemilikan tanah perumahan (format PDF).
12. Upload scan dokumen penyediaan lahan pemakaman (format PDF).
13. Upload scan Akta Pendirian Badan Usaha apabila rencana jumlah kaveling unit rumah 21 atau lebih (format PDF).
14. Upload scan Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Perumahan dari BPBD apabila lokasi perumahan berada di daerah rawan bencana (format PDF).
15. Upload bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan berupa :
 - a) Persetujuan teknis pengelolaan air limbah jika membangun perumahan non-subsidi
 - b) SPPL Rinci yang diperoleh melalui simple.purworejokab.go.id jika membangun perumahan subsidi
16. Upload scan Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan bermaterai (format PDF).
17. Upload scan Surat Pernyataan Pembangunan Rumah dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan dan bermaterai (format PDF).
18. Upload scan Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan bermaterai (format terlampir).
19. Upload scan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat bermaterai (format terlampir).
20. Berkas cetak SYARAT ADMINISTRASI pada poin A disampaikan ke gerai DPMPTSP pada Mal Pelayanan Publik (MPP) bersamaan saat pengambilan asli SK dan Gambar Siteplan yang telah disahkan oleh DINPERKIMTAN. Berkas cetak syarat administrasi dilengkapi dengan check list daftar dokumen (format terlampir).

D. Format Gambar Permohonan Pengesahan Siteplan Baru

Format gambar pengesahan siteplan baru mengacu pada contoh dibawah. Bentuk layout dapat menyesuaikan namun tidak mengurangi komponen informasi. Informasi tambahan seperti penyediaan sarana mushola, pos keamanan, dsb dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Format kertas A4 atau A3 memperhatikan jumlah kaveling yang dipecah dan kemudahan dalam pembacaan gambar/tulisan.

NAMA PERUMAHAN

RT ... / RW ... DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN PURWOREJO

LEMBAR PENGESAHAN SITEPLAN

NOMOR REGISTER :

NO	JUDUL GAMBAR	SKALA
1	LEMBAR PENGESAHAN	
2	DENAH LOKASI	
3	GAMBAR SITEPLAN DENGAN UKURAN	
4	TABEL RENCANA INTENSITAS BANGUNAN	
5	GAMBAR GARIS SEMPADAN, JALAN, DRAINASE, DAN SUMUR RESAPAN AIR HUJAN	
6	GAMBAR PRASARANA AIR BERSIH, PJU DAN RTH PUBLIK	
7	DETAIL POTONGAN JALAN DAN DRAINASE	
8	GAMBAR PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN SAMPAH	

PEMOHON	DISETUJUI
.....	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M. NIP. 19670515 199103 1 017



PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN

LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

PALADINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

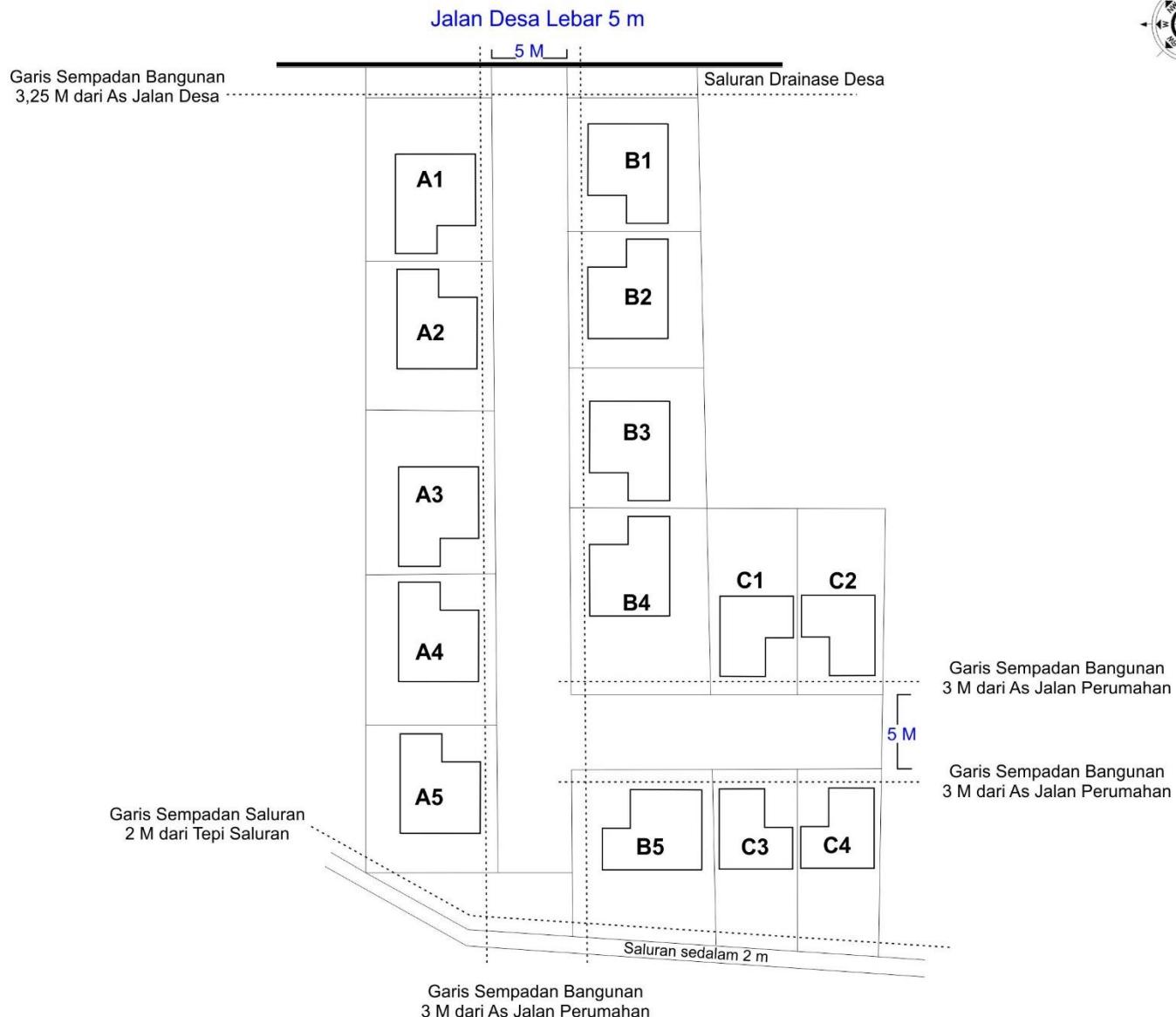
PEMOHON

JUDUL GAMBAR

NO
1

SITEPLAN DENGAN UKURAN

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN



LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

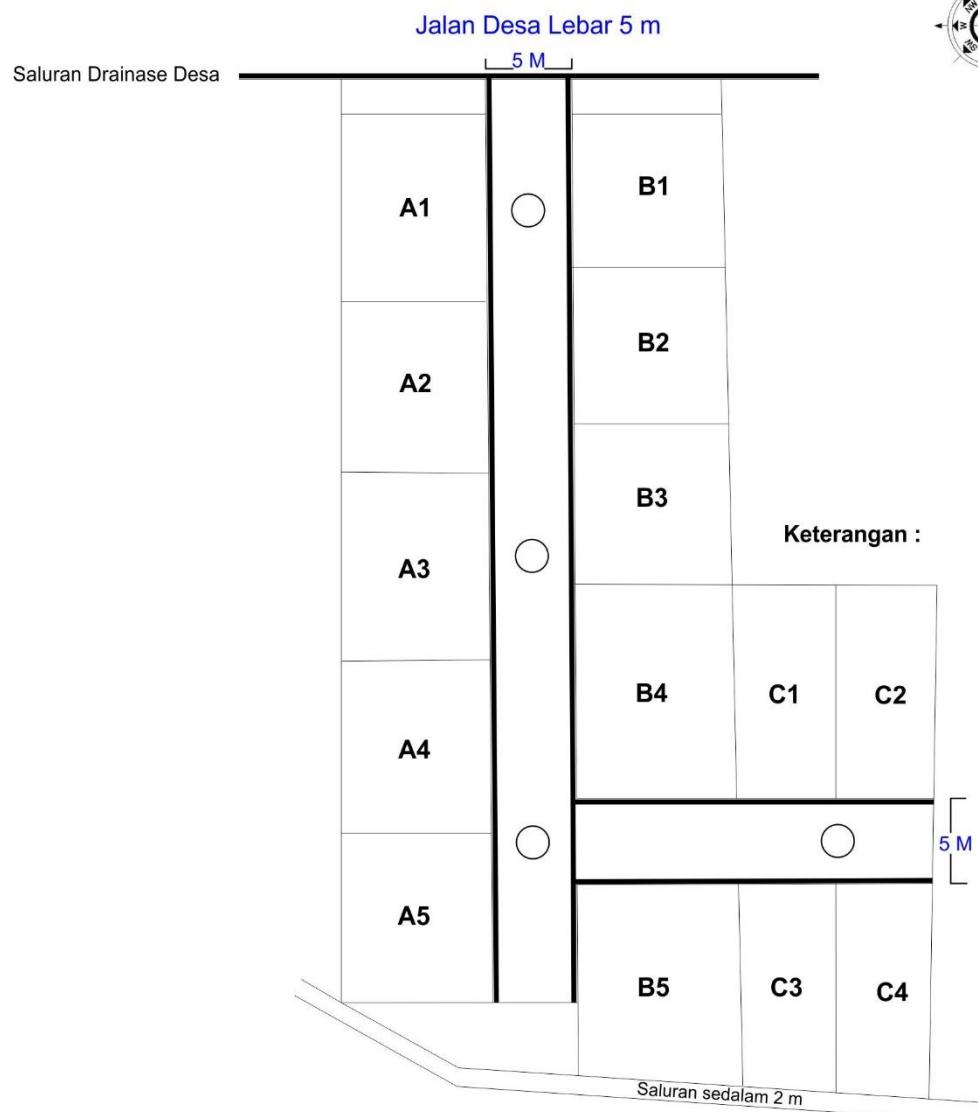
EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

JUDUL GAMBAR

NO. 2	GARIS SEMPADAN DAN RENCANA PENEMPATAN MASA BANGUNAN
-----------------	---

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN



Keterangan :

Keterangan :

— : Drainase

○ : Sumur Resapan Air Hujan

LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

JUDUL GAMBAR

NO.	JALAN, DRAINASE, DAN SUMUR RESAPAN AIR HUJAN
3	

TABEL INTENSITAS BANGUNAN PERUMAHAN

No	No Kaveling	Luas Kaveling (M2)	Type	Type Lantai 1	Type Lantai 2	RTH Kaveling (M2)	KDB	KLB	Jumlah Lantai
1	A1	93	75	45	30	48	48,4%	0,8	2
2	A2	93	75	45	30	48	48,4%	0,8	2
3	A3	93	45	45	-	48	48,4%	0,5	1
4	A4	85	45	45	-	40	52,9%	0,5	1
5	A5	104	45	45	-	59	43,3%	0,4	1
6	B1	87	45	45	-	42	51,7%	0,5	1
7	B2	89	45	45	-	44	50,6%	0,5	1
8	B3	86	45	45	-	41	52,3%	0,5	1
9	B4	119	45	45	-	74	37,8%	0,4	1
10	B5	107	45	45	-	62	42,1%	0,4	1
11	C1	70	36	36	-	34	51,4%	0,5	1
12	C2	71	36	36	-	35	50,7%	0,5	1
13	C3	66	36	36	-	30	54,5%	0,5	1
14	C4	65	36	36	-	29	55,4%	0,6	1
JUMLAH		1.228		594		634			

Luas Total Lahan	1.304 m ²
Luas Total Kaveling	1.228 m ²
Luas Total Lantai Dasar Bangunan	594 m ²
Luas Total RTH Kaveling	634 m ²
Luas RTH Publik	73,72 m ²
Luas Jalan dan Drainase	382,35 m ²
Luas Fasum Lainnya	-
Persentase KDB Total	594 : 1.304 x 100% = 45,55%
Persentase KDH Total	(634 + 73,72) / 1.304 x 100% = 54,27%
Persentase PSU	(73,72 + 382,35) / 1.304 x 100% = 34,97%

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN

LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

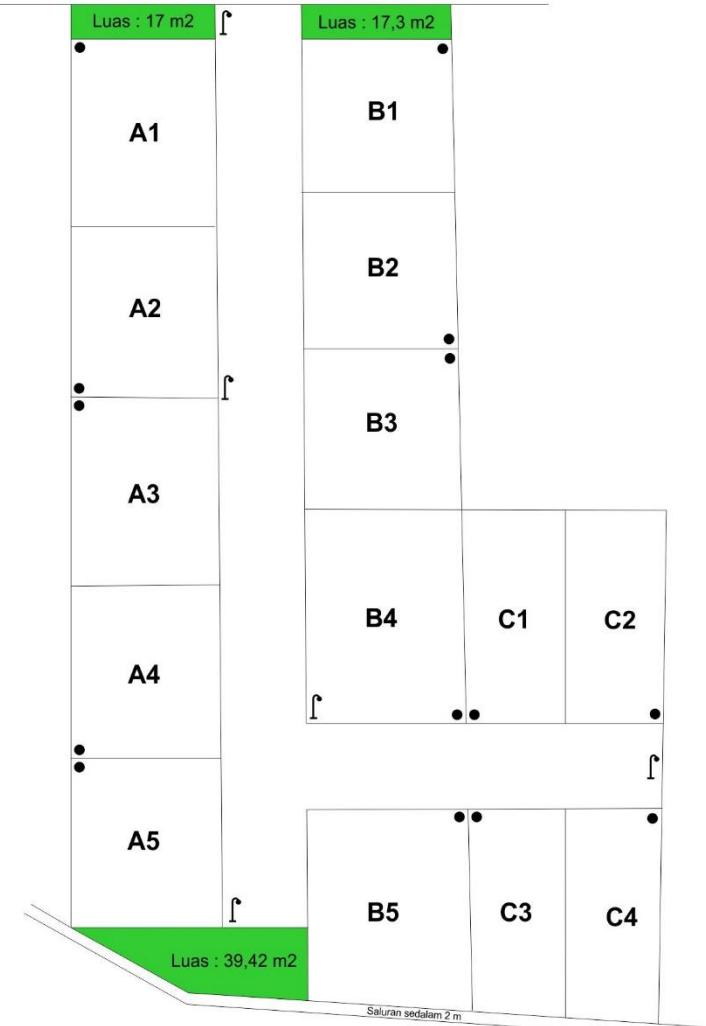
JUDUL GAMBAR

NO.
4 TABEL INTENSITAS
BANGUNAN

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN



Jalan Desa Lebar 5 m



Keterangan :

- : Sumur Bor Dangkal
- └ : PJU
- : RTH Publik

LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

JUDUL GAMBAR

NO. 5	PRASARANA AIR BERSIH, PJU, DAN RTH PUBLIK
----------	--

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN

LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

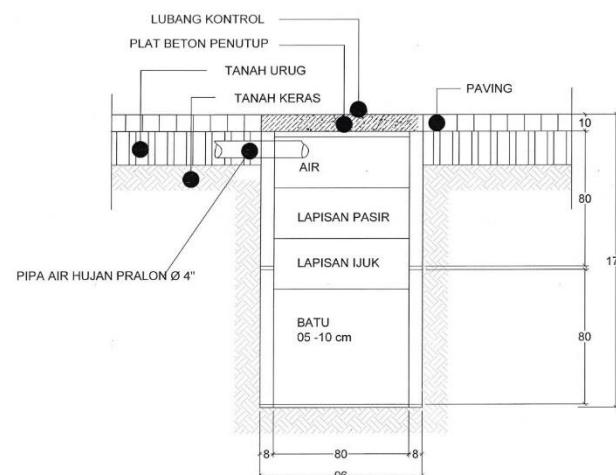
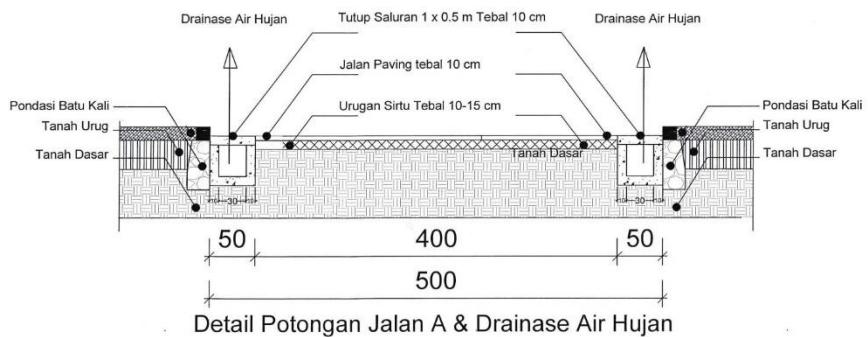
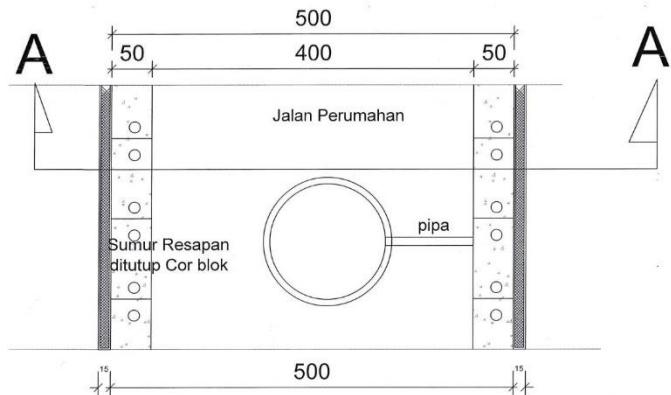
EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

JUDUL GAMBAR

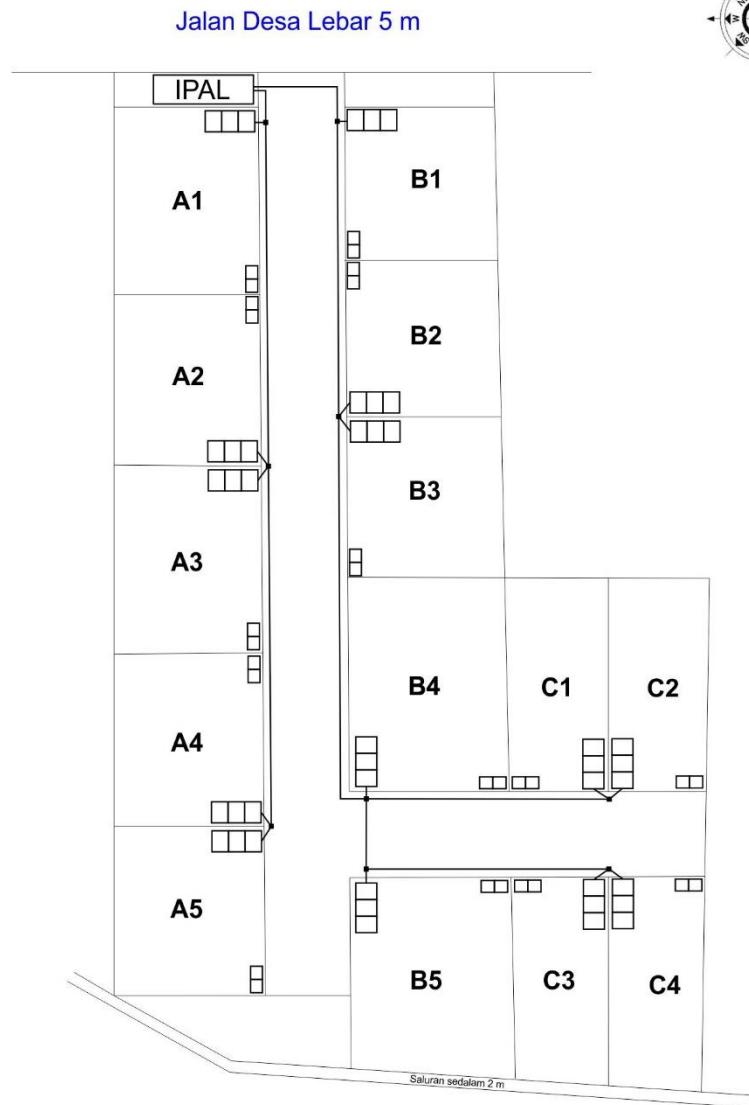
NO.
6

DETAIL POTONGAN JALAN
DAN DRAINASE



Potongan Sumur Resapan Air Hujan

PENGESAHAN SITEPLAN PERUMAHAN



LOKASI KEGIATAN

RT ... / RW ... DESA/KEL ...
KEC ... KAB. PURWOREJO

NOMOR REGISTER

DISETUJUI

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

EKO PASKIYANTO, A.Pi., M.M.
NIP. 19670515 199103 1 017

PEMOHON

JUDUL GAMBAR

NO.	PRASARANA PENGOLAH AIR LIMBAH DAN SAMPAH
7	

E. Contoh Format Surat Permohonan Pengesahan Siteplan Baru (Untuk Perorangan)

Purworejo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Pengesahan
Siteplan Perumahan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan pengesahan siteplan perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...
Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Purworejo
Luas Tanah : m²
Sertifikat Tanah : SHM/SHGB No. Desa/Kelurahan ...
Kecamatan ...
Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Pas foto 4x6 berwarna
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan
4. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman
5. Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
6. **Asli** Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menanggani kebencanaan (jika lokasi berada pada daerah rawan bencana)
7. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan perumahan
8. Dokumen penyediaan lahan pemakaman
9. Berita Acara Persetujuan Teknis Air Limbah dari Perangkat Daerah yang berwenang.
10. **Asli** Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan
11. **Asli** Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan

12. **Asli** Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan
13. **Asli** Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat
14. **Asli** surat pernyataan bermaterai Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi jika pembangunan diperuntukan untuk rumah umum/ subsidi
15. Gambar Siteplan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP

**F. Contoh Format Surat Permohonan Pengesahan Siteplan Baru
(Untuk Badan Usaha)**

KOP PERUSAHAAN

Purworejo,

No : Kepada :
Lampiran : 1 bendel Yth. Kepala Dinas Perumahan
Perihal : Permohonan Pengesahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Siteplan Perumahan dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo
Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Jabatan : Direktur PT. / CV. ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan pengesahan siteplan perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...

Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Purworejo

Luas Tanah : m²

No. Sertifikat : SHM/SHGB No. Desa/Kelurahan ...
Kecamatan ...

Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Pas foto 4x6 berwarna
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan
4. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman
5. Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
6. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha yang masih berlaku (apabila rencana jumlah kaveling 21 unit atau lebih)
7. **Asli** Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menanggani kebencanaan (jika lokasi berada pada daerah rawan bencana)
8. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan perumahan
9. Dokumen penyediaan lahan pemakaman
10. Berita Acara Persetujuan Teknis Air Limbah dari Perangkat Daerah yang berwenang
11. **Asli** Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan
12. **Asli** Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan

13. **Asli** Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan
14. **Asli** Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat
15. **Asli** Surat Pernyataan Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi
(jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi)
16. Gambar Siteplan

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(ttd dan cap)

NAMA LENGKAP

Direktur PT. / CV.

G. Contoh Format Surat Permohonan NJOP Lahan Perumahan

Purworejo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan NJOP
Tertinggi dan Besaran
Uang Pengganti Lahan
Pemakaman

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Pekerjaan/Jabatan : ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi lahan untuk rencana pembangunan perumahan dan besaran uang pengganti lahan pemakaman yang harus disetor ke rekening kas umum daerah sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...

Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Purworejo

Luas Tanah : m²

Sertipikat Tanah : SHM/SHGB No. Desa/Kelurahan ...
Kecamatan ...

Titik Koordinat

Sudut : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ... dst

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan
4. Fotokopi sertipikat kepemilikan lahan perumahan

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP
Direktur PT. / CV.

H. Format Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU

SURAT PERNYATAAN **KESEDIAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Purworejo
7. Titik Koordinat :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan sebagaimana disebutkan diatas secara legalitas lahan dan fisik bangunan dalam kondisi baik sesuai siteplan yang disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

I. Format Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU Sesuai Dengan Siteplan yang Disahkan

SURAT PERNYATAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PSU
SESUAI DENGAN SITEPLAN YANG DISAHKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
7. Koordinat Perumahan:
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan akan membangun perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan SK dan gambar siteplan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Apabila melanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

J. Format Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan

SURAT PERNYATAAN
NILAI PEROLEHAN TANAH PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT ... / RW ... Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Purworejo
7. Koordinat Perumahan :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memperoleh sebidang tanah pekarangan seluas (terbilang) m² sebagaimana SHM/SHGB Nomor ... Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Purworejo senilai Rp. ... /m² (terbilang per meter persegi) yang digunakan untuk pembangunan Perumahan ... sebanyak ... unit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya..

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

K. Format Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat

SURAT PERNYATAAN **PELEPASAN TANAH PSU SAAT PECAH SERTIPIKAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
7. Koordinat Perumahan :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan akan sekaligus melepasan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) seluas sekitar (terbilang) m² pada saat melakukan pecah sertifikat yang dibuktikan dengan menyerahkan akta pelepasan notariil atau dokumen lain yang berlaku kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo guna mendukung pelaksanaan penyerahan PSU perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

L. Surat Pernyataan Membangun Rumah Subsidi

SURAT PERNYATAAN **MEMBANGUN RUMAH SUBSIDI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
.....
7. Koordinat Perumahan :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan benar akan membangun rumah subsidi sejumlah unit pada perumahan sebagaimana tersebut di atas sesuai siteplan yang disahkan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.0000)

(.....)

M. Format Check List Berkas Administrasi

CHECK LIST BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENGESAHAN SITEPLAN

Nama Pemohon :
 Nama Perusahaan :
 Nama Perumahan :
 Lokasi Perumahan : RT ... / RW ... Desa/Kelurahan ..., Kec. ..., Kab.
 Luas Lahan : m²
 Jumlah Unit :
 No HP :

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	Asli Surat Permohonan Pengesahan Siteplan			
2	Fotokopi KTP pemohon			
3	Pas foto 4x6 berwarna			
4	Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)			
5	Surat KRK / KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan			
6	Asli Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan (jika perumahan berada di rawan bencana)			
7	Fotokopi bukti sertifikat kepemilikan lahan perumahan			
8	Lahan makam disediakan di dalam siteplan perumahan (cek gambar)			Jika lahan makam disediakan di dalam siteplan, maka dokumen nomor 9, 10, 11, 12, 13 tidak diperlukan.
9	Surat KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman (jika disediakan di luar tanah perumahan yang dimohonkan)			Jika lahan makam disediakan di luar lokasi perumahan maka melampirkan berkas nomor 9, 10 dan 11.
10	Asli sertifikat tanah makam atas nama pengembang			Sedangkan berkas nomor 11, 12 dan 13 tidak diperlukan
11	Asli akta notaris pelepasan tanah makam			
12	Asli surat keterangan NJOP tertinggi dan besaran uang pengganti lahan pemakaman			Jika tidak menyediakan lahan makam baik

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
	dari perangkat daerah yang berwenang			di dalam maupun di luar
13	Asli bukti setor uang pengganti lahan pemakaman ke rekening kas umum daerah			perumahan maka melampirkan berkas nomor 12 dan 13. Sedangkan berkas nomor 9, 10 dan 11 tidak diperlukan
14	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang masih berlaku (khusus pemohon berbadan usaha)			
15	Bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan			
16	Asli Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan bermaterai			
17	Asli Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan dan bermaterai			
18	Asli Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan			
19	Asli Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat			
20	Asli Surat Pernyataan Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi bermaterai			Jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi.

Purworejo,

Petugas Penerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

III. PERMOHONAN PERUBAHAN / REVISI SITEPLAN

A. Syarat Umum Permohonan Perubahan/Revisi Siteplan

1. Rencana tapak / siteplan perumahan yang telah mendapatkan pengesahan sebelumnya oleh **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo** dapat diajukan perubahan/revisi dalam hal berikut :
 - a) perubahan nama perumahan,
 - b) proporsi PSU yang tidak sesuai ketentuan,
 - c) penambahan luas lahan,
 - d) perubahan bentuk dan luas kaveling,
 - e) penambahan atau pengurangan jumlah kaveling,
 - f) perubahan tipe bangunan; dan/atau
 - g) perubahan fungsi bangunan.
2. Perubahan/revisi siteplan tidak mengurangi proporsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada siteplan yang telah disahkan sebelumnya.
3. Perubahan/revisi siteplan dapat dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali.

B. Syarat Administrasi Permohonan Perubahan Siteplan

1. **Asli** Surat Permohonan Pengesahan Perubahan Siteplan.

Diajukan oleh pemohon (pengembang) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (contoh terlampir).

2. Pas foto 4x6 berwarna pemohon
3. Fotokopi KTP pemohon (pengembang).
4. Dokumen perizinan berusaha yang diperoleh melalui sistem OSS (yang memuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau sertifikat standar).
5. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lokasi lahan perumahan yang diajukan.
KRK atau KKPR dari DPUPR yang menyatakan bahwa lokasi dimohon merupakan zona peruntukan yang dapat dibangun perumahan dan permukiman (tidak masuk dalam lahan pertanian basah/ tanaman pangan yang termasuk dalam KP2B/LSD).
6. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non-Berusaha lahan pemakaman apabila disediakan di luar tanah perumahan yang dimohonkan (format PDF).
7. Dokumen penyediaan lahan pemakaman (pilih salah satu) :
 - a) Jika lahan makam disediakan di dalam lokasi perumahan maka tidak memerlukan dokumen penyediaan makam. Gambar siteplan yang tertera penyediaan lahan pemakaman sebagai bukti dokumen penyediaan lahan pemakaman dalam permohonan online.
 - b) Fotokopi Surat Izin Penggunaan Makam Desa/Kelurahan yang telah terbit pada pengesahan siteplan sebelumnya,
 - c) Asli Sertifikat tanah makam atas nama pengembang **disertai** Asli akta notaris pelepasan tanah makam jika lahan makam disediakan di luar lokasi tanah perumahan yang diajukan, **atau**
 - d) Asli bukti setor uang pengganti lahan pemakaman ke rekening kas umum daerah **disertai** Asli surat keterangan NJOP tertinggi dan besaran uang pengganti lahan pemakaman dari perangkat daerah yang berwenang (format PDF).
8. **Asli** Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menanggani kebencanaan apabila lokasi perumahan masuk dalam daerah rawan bencana.
9. Fotokopi bukti sertifikat kepemilikan tanah perumahan dengan ketentuan :

- a) SHM untuk pengembang perorangan dan SHGB untuk pengembang berbadan hukum,
 - b) sertifikat atas nama pemohon/pengembang, dan
 - c) merupakan sertifikat gabungan (induk) jika lokasi yang dimohon meliputi 2 (dua) atau lebih sertifikat tanah.
10. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha yang masih berlaku (apabila rencana jumlah kaveling 21 unit atau lebih).
 11. Bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan berupa :
 - a) Persetujuan teknis pengelolaan air limbah jika membangun perumahan non-subsidi
 - b) SPPL Rinci yang diperoleh melalui simple.purworejokab.go.id jika membangun perumahan subsidi
 12. **Asli** surat pernyataan bermaterai Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan (format terlampir).
 13. **Asli** Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan dan bermaterai (format terlampir).
 14. **Asli** surat pernyataan bermaterai Nilai Perolehan Tanah Perumahan (format terlampir). Apabila terdiri dari beberapa nilai perolehan karena sertifikat lebih dari satu, maka yang digunakan adalah nilai perolehan tanah tertinggi.
 15. **Asli** surat pernyataan bermaterai Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat (format terlampir).
 16. **Asli** surat pernyataan bermaterai Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi (format terlampir).
 17. **Asli**/Salinan Siteplan Perumahan yang telah disahkan sebelumnya (Lembar SK, Tabel Simak, dan Gambar Siteplan).
 18. Gambar Rencana Perubahan Siteplan dalam format A4 atau A3 (format terlampir) yang sudah ditandatangani pemohon. Pemilihan ukuran kertas memperhatikan luas lahan perumahan dan kejelasan tulisan hasil cetak untuk dibaca.

C. Syarat Teknis dan Format Gambar Permohonan Perubahan Siteplan

Sama dengan Penjelasan I.B Syarat Teknis Permohonan Pengesahan Siteplan Baru dan I.D Format Gambar Permohonan Pengesahan Siteplan Baru. Format gambar perubahan/revisi siteplan sama dengan format gambar siteplan baru hanya berbeda pada judul yaitu :

- **Lembar Pengesahan Siteplan** diganti **Lembar Pengesahan Perubahan/Revisi Siteplan** untuk halaman pertama.
- **Pengesahan Siteplan Perumahan** diganti **Pengesahan Perubahan/Revisi Siteplan Perumahan** untuk lembar setelahnya.

D. Prosedur Pengajuan Izin Permohonan Perubahan Siteplan

1. Scan seluruh dokumen wajib menggunakan mesin scan untuk menjamin hasil pindai datar, tegak lurus, detail, jelas, dan mudah terbaca.
2. Pemohon mengajukan permohonan online melalui izin.purworejokab.go.id. dengan memilih menu **Permohonan Izin** → **Permohonan Pengesahan Siteplan** → **Perubahan/Revisi**.
3. Isi informasi data-data yang diperlukan. Simpan nomor pendaftaran dan password untuk *tracking* progres permohonan *online*.
4. Upload scan surat Permohonan dari pemohon (format PDF).
5. Upload pas foto 4x6 (format JPG).
6. Upload scan KTP pemohon (format JPG).

7. Upload dokumen perizinan berusaha yang diperoleh melalui sistem OSS (format PDF).
8. Upload scan KRK atau KKPR lahan perumahan (format PDF).
9. Upload scan dokumen penyediaan lahan pemakaman (format PDF).
10. Upload scan KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman apabila disediakan di luar tanah perumahan yang dimohonkan (format PDF).
11. Upload scan sertifikat kepemilikan tanah perumahan (format PDF).
12. Upload scan Akta Pendirian Badan Usaha apabila rencana jumlah kaveling unit rumah 21 atau lebih (format PDF).
13. Upload scan Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Perumahan dari BPBD apabila lokasi perumahan berada di daerah rawan bencana (format PDF).
19. Upload scan bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan berupa :
 - a) Persetujuan teknis pengelolaan air limbah jika membangun perumahan non-subsidi
 - b) SPPL Rinci yang diperoleh melalui simple.purworejokab.go.id jika membangun perumahan subsidi.
14. Upload scan Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan bermaterai (format PDF).
15. Upload scan Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan dan bermaterai (format PDF).
16. Upload scan Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan bermaterai (format terlampir).
17. Upload scan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat bermaterai (format terlampir).
18. Upload scan Surat Pernyataan Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi bermaterai (jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi).
19. Upload scan siteplan perumahan yang telah disahkan sebelumnya.
20. Upload gambar rencana perubahan/revisi siteplan dalam format A4 atau A3 (format terlampir) yang sudah ditandatangani pemohon
21. Berkas cetak SYARAT ADMINISTRASI pada poin B disampaikan ke gerai DPMPTSP pada Mall Pelayanan Publik (MPP) bersamaan saat pengambilan asli SK dan Gambar Perubahan/Revisi Siteplan yang telah disahkan oleh Diperkimtan. Berkas cetak syarat administrasi dilengkapi dengan check list daftar dokumen (format terlampir).

E. Contoh Format Surat Permohonan Perubahan/Revisi Siteplan (Untuk Perorangan)

Purworejo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Pengesahan
Perubahan/Revisi
Siteplan Perumahan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo
Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan pengesahan **PERUBAHAN/REVISI SITEPLAN** perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...
Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
....., Kecamatan,
Kabupaten Purworejo
Luas Tanah : m²
Titik Koordinat :
Nomor SK Siteplan
Sebelumnya :
Tanggal SK Siteplan
Sebelumnya :
Sertipikat Tanah Induk : SHM / SHBG No. ... Desa/Kelurahan
Kecamatan
Perihal perubahan : (pilih yang sesuai)
a) perubahan nama perumahan,
b) proporsi PSU yang tidak sesuai ketentuan,
c) penambahan luas lahan,
d) perubahan bentuk dan luas kaveling,
e) penambahan atau pengurangan jumlah kaveling,
f) perubahan tipe bangunan; dan/atau
g) perubahan fungsi bangunan.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Pas foto 4x6 berwarna pemohon
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan

4. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman jika disediakan di luar lahan perumahan yang diajukan
5. **Asli** Dokumen penyediaan lahan pemakaman (jika tidak menyediakan lahan pemakaman di dalam lokasi perumahan)
6. **Asli** Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
7. **Asli** Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menanggani kebencanaan (jika lokasi berada pada daerah rawan bencana)
8. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan perumahan
9. Berita Acara Persetujuan Teknis Air Limbah dari perangkat daerah yang berwenang.
10. **Asli** Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan
11. **Asli** Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan
12. **Asli** Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan
13. **Asli** Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat
14. **Asli** Surat Pernyataan Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi bermaterai jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi
15. **Asli**/Salinan SK Siteplan Perumahan yang telah disahkan sebelumnya
16. Gambar Rencana perubahan siteplan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP

F. Contoh Format Surat Permohonan Perubahan Siteplan (Untuk Badan Usaha)

KOP PERUSAHAAN

Purworejo,

No :
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Pengesahan
Perubahan/Revisi Siteplan
Perumahan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Jabatan : Direktur PT. / CV. ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan pengesahan **PERUBAHAN/REVISI SITEPLAN** perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...
Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
....., Kecamatan,
Kabupaten Purworejo
Luas Tanah : m²
Titik Koordinat :
Nomor SK Siteplan
Sebelumnya :
Tanggal SK Siteplan
Sebelumnya :
Sertipikat Tanah Induk : SHM / SHBG No. ... Desa/Kelurahan
Kecamatan

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Pas foto 4x6 berwarna
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan
4. Surat KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman jika disediakan di luar lahan perumahan yang diajukan
5. **Asli** Dokumen penyediaan lahan pemakaman (jika tidak menyediakan lahan pemakaman di dalam lokasi perumahan)
6. Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
7. **Asli** Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan atau sejenisnya dari perangkat daerah yang menanggani kebencanaan (jika lokasi berada pada daerah rawan bencana)
8. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan perumahan

9. Fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila rencana jumlah kaveling sebanyak 21 unit atau lebih).
10. Berita Acara Persetujuan Teknis Air Limbah dari perangkat daerah yang berwenang.
11. **Asli** Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan
12. **Asli** Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan
13. **Asli** Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan
14. **Asli** Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat
15. **Asli** Surat Pernyataan Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi bermaterai jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi
16. **Asli/Salinan** SK Siteplan Perumahan yang telah disahkan sebelumnya
17. Gambar Rencana perubahan siteplan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(ttd dan cap)

NAMA LENGKAP
Direktur PT. / CV.

G. Contoh Format Surat Permohonan NJOP Lahan Perumahan dan Besaran Uang Pengganti Lahan Pemakaman

Purworejo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan NJOP
Tertinggi dan Besaran
Uang Pengganti Lahan
Pemakaman

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kabupaten Purworejo

Di
PURWOREJO

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Pekerjaan/Jabatan : / Direktur PT/CV ...
Alamat : ...
NIK : ...
No HP/Tlp : ...

Mengajukan permohonan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi dan besaran uang pengganti lahan untuk rencana pembangunan perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan : ...

Lokasi : RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Purworejo

Luas Tanah : m²

Sertipikat Tanah : SHM/SHGB No. Desa/Kelurahan ...
Kecamatan ...

Titik Koordinat

Sudut : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ... dst

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)
3. Surat KRK /KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan
4. Fotokopi sertipikat kepemilikan lahan perumahan

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(ttd dan cap)

NAMA LENGKAP
Direktur PT. / CV.

H. Format Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan PSU

SURAT PERNYATAAN **KESEDIAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Purworejo
7. Telepon / HP :m

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan sebagaimana disebutkan diatas secara legalitas lahan dan fisik bangunan dalam kondisi baik sesuai siteplan yang disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

I. Format Surat Pernyataan Pembangunan Perumahan dan PSU Sesuai Dengan Siteplan yang Disahkan

SURAT PERNYATAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PSU
SESUAI DENGAN SITEPLAN YANG DISAHKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
7. Telepon / HP :
8. Koordinat Perumahan:

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan akan membangun perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan SK dan gambar siteplan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Apabila melanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

J. Format Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah Perumahan

SURAT PERNYATAAN **NILAI PEROLEHAN TANAH PERUMAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
.....
.....
7. Telepon / HP :
8. Koordinat Perumahan :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memperoleh sebidang tanah pekarangan seluas (terbilang) m² yang berlokasi di RT ... RW ... Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Purworejo senilai Rp. ... /m² (terbilang per meter persegi) yang digunakan untuk pembangunan Perumahan ... sebanyak ... unit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya..

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

K. Format Surat Pernyataan Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertifikat

SURAT PERNYATAAN **PELEPASAN TANAH PSU SAAT PECAH SERTIPIKAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
7. Telepon / HP :
8. Koordinat Perumahan :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan akan sekaligus melepasan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) seluas sekitar (terbilang) m² pada saat melakukan pecah sertifikat yang dibuktikan dengan menyerahkan akta pelepasan notariil atau dokumen lain yang berlaku kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo guna mendukung pelaksanaan penyerahan PSU perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

L. Surat Pernyataan Membangun Rumah Subsidi

SURAT PERNYATAAN **MEMBANGUN RUMAH SUBSIDI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan :
7. Koordinat Perumahan :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya menyatakan benar akan membangun rumah subsidi sejumlah unit pada perumahan sebagaimana tersebut di atas sesuai siteplan yang disahkan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purworejo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

M. Format Check List Berkas Administrasi

**CHECK LIST BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN/REVISI SITEPLAN**

Nama Pemohon :
 Nama Perusahaan :
 Nama Perumahan :
 Lokasi Perumahan : RT ... / RW ... Desa/Kelurahan ..., Kec. ..., Kab. ...
 Luas Lahan : m²
 Jumlah Unit :
 No HP :

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	Asli Surat Permohonan Pengesahan Perubahan Siteplan			
2	Pas foto 4x6 berwarna pemohon			
3	Fotokopi KTP pemohon			
4	Dokumen perizinan berusaha (NIB dan/atau sertifikat standar)			
5	Fotokopi Surat KRK / KKPR lokasi lahan perumahan yang diajukan			
6	Asli Surat Rekomendasi Teknis pembangunan perumahan (jika perumahan berada di rawan bencana)			
7	Fotokopi bukti sertifikat kepemilikan lahan perumahan			
8	Lahan makam disediakan di dalam siteplan perumahan (cek gambar)			Jika lahan makam disediakan di dalam siteplan, maka dokumen nomor 9, 10, 11, 12, 13 tidak diperlukan.
9	Fotokopi KKPR Berusaha / KKPR Non Berusaha lahan pemakaman (jika disediakan di luar tanah perumahan yang dimohonkan)			Jika lahan makam disediakan di luar lokasi perumahan maka melampirkan berkas nomor 9, 10 dan 11. Sedangkan berkas nomor 12 dan 13 tidak diperlukan
10	Asli sertifikat tanah makam atas nama pengembang			
11	Asli akta notaris pelepasan tanah makam			
12	Asli surat keterangan NJOP dan besaran uang pengganti lahan pemakaman dari dinas terkait			Jika tidak menyediakan lahan makam baik di dalam maupun di luar perumahan maka melampirkan berkas nomor 12 dan 13.
13	Asli bukti setor uang pengganti lahan pemakaman ke rekening kas umum daerah			

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
				Sedangkan berkas nomor 9, 10 dan 11 tidak diperlukan
14	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang masih berlaku (khusus pemohon berbadan usaha)			
15	Bukti proses penyusunan dokumen persetujuan lingkungan			
16	Asli surat pernyataan bermaterai Kesediaan Penyerahan PSU Perumahan			
17	Asli surat pernyataan bermaterai Pembangunan Perumahan dan PSU sesuai dengan siteplan yang disahkan			
18	Asli surat pernyataan bermaterai Nilai Perolehan Tanah Perumahan			
19	Asli surat pernyataan bermaterai Pelepasan Tanah PSU Saat Pecah Sertipikat			
20	Asli surat pernyataan bermaterai Benar – Benar Membangun Rumah Subsidi			Jika pembangunan diperuntukan untuk perumahan subsidi
21	Asli/Salinan Siteplan Perumahan yang telah disahkan sebelumnya (Lembar SK, Tabel Simak, dan Gambar Siteplan)			

Purworejo,

Petugas Penerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)